

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, R. (2021). *Metodologi Penelitian dan Sosial Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Amin, R. (2020). *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Deepublish. Sleman.
- Anwar, Y. & Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Arif, B. N. (2000). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Buherah. (2008). *Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Daerah*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Jakarta.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hartanti, E. (2012). *Tindak Pidana Korupsi; Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Ilyas, A. & Jufri. (2018). *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. Gemar Publishing. Makassar.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Iskandar, O. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*. Deepublish. Yogyakarta.
- Jaya, S. (2010). *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Pengadilan*. Elsam. Jakarta.

- Margono. (2021). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhadar, Abdullah, E., & Thamrin, H. (2009). *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Mulyadi, L. (2007). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Mulyadi, L., Suharyanto, B., & Sudaryanto. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Bogor.
- Mustofa, W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Prenadamedia Group. Semarang.
- Nurdjana, I.G.M. (2005). *Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pasaribu, E. P. (2025). *Justice Collaborator (Saksi Pelaku)-Kajian, Praktik, Komparasi, dan Pembaruan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hakim Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Setiyawan, W. B. M., et al. (2024). *Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sada Kurnia Pustaka. Banten.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media. Pasuruan.

- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Kepel Press. Yogyakarta.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat Hukum*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Syauket, A. & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Litnus. Malang.
- Umar, N. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. LP2M IAIN Ambon. Ambon.
- Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Wibowo, A., et al. (2022). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. CV. Media Sains Indonesia. Bandung.
- Wijaya, F. (2012). *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Penaku. Jakarta.

JURNAL

- Arliman, L., & Hutajulu, M. M., "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 8, No. 2, Januari 2026, <https://doi.org/10.33559/eoj.v8i2.3755>.
- Awaluddin, A., & Hajairin, "Positivisme Hukum dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum di Masyarakat", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2026, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3627>.
- Djawa, M. J., Medan, K., & Fallo, D. F., "Problematika Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelakau Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Hukum Positif di Indonesia", *Petitum Law Journal*, Vol. 1, No. 2, Mei 2024, <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i2.15391>.
- Fasil, M. R. A., et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi,

Pengaruh Terhadap Putusan Hukum”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

Fasil, M. R. A., *et.al.*, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Kepada Putusan Hukum”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>.

Fatah, M. A. G., “Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 07, No. 1, Januari 2024.

Febriyanti, W. D. R., “Penemuan Hukum (*Rechtvinding*) dan Pembentukan Hukum (*Rechtsschepping*) dalam Sistem Peradilan Indonesia”, *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2025, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107752>.

Harahap, K., “Implementasi Hak-Hak *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, Juli 2021, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1203>.

Harahap, M. M. & Anwar. R., “Permasalahan Yuridis Penentuan Pelaku Utama dalam Pemberian *Justice Collaborator* Sebuah Tindak Pidana Tertentu”. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1, Juni 2022, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i1.2943>.

Ismaidar., Sembiring. T. Br., & Harefa, J. E., “Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 4, Desember 2024, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.727>.

Karyadi, I. P. D., & Saraswati, P. S., “Peranan Diskresi Hakim dalam Kewenangan Mengadili”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 02, No. 01, 2022.

Kurnia, T. S., “Mahkamah Agung dan Supremasi Konstitusi: Diskresi Yudisial dalam Penerapan Undang-Undang”, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2084>.

- Marpaung, B., “Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 2, No. 2, November 2022.
- Maulana, R. R., & Triadi, I., “Peran Hakim dalam Penemuan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, Vol. 6, No. 4, 2025.
- Prakoso, D. A., “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan dan Perlindungan Saksi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2020, <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1182>.
- Prestiw, A. D., Amin, H. D., & Desliyona, “The Effectiveness Of Using Restorative Justice Against Minor Corruption Crime in Achieve The Ultimum Remedium”, *Corruptio*, Vol. 03, No. 01, Januari 2022, <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2720>.
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P., “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Maret 2025, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1173>.
- Putri, L. D. N., & Martana, D. M., “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 12, 2025.
- Redaya, A., *et.al.*, “Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Parleментар: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 3, September 2024, <https://doi.org/10.62383/parleментар.v1i3.56>.
- Sentosa, D., & Suherman, A., “Penggunaan *Justice Collaborator* Terhadap Efektivitas Penyelesaian Kasus Korupsi”, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, Desember 2024, <https://doi.org/10.62379/3p59rz15>.
- Simamora, N. A., & Pranoto, E., “Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai *Justice Collaborator* di Indonesia”, *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.115>.

Situmorang, A. F., *et.al.*, “Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo”, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni 2025.

Yudhistira, B., *et.al.*, “Problematik Pemberian Status *Justice Collaborator* pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1846>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan Bagi Saksi Pelaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111).

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

HASIL PENELITIAN

Ichsan, T. N., Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Kencana, A. C., Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan dan Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana Korupsi pada Proses Peradilan, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

Taulo, R. F. A., Perbandingan Hukum Mengenai Ketentuan *Justice Collaborator* di Negara Belanda dengan di Negara Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

INTERNET

“Naik 3, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 masih tetap buruk”, <https://sustain.id/2025/02/20/naik-3-skor-indeks-persepsi-korupsi-cpi-indonesia-tahun-2024-masih-tetap-buruk/>, diakses pada 29 Oktober 2025.